

MODUL

PENGANTAR ILMU ADMINISTRASI NEGARA

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA



Oleh

EKA WAHYU HIDAYAT, S.IP., M.Si
NIDN. 0429028401

FISIP UNIVERSITAS JAYABAYA

JAKARTA

2019

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga Modul “Pengantar Ilmu Administrasi Negara” dapat diselesaikan. Modul ini disusun untuk memenuhi tujuan utama dalam pembuatan Modul ini adalah untuk memfasilitasi proses pembelajaran dan komunikasi pesan dengan lebih efisien dan efektif. Modul juga dapat digunakan sebagai sarana penilaian, referensi, dan untuk mengatasi pembatasan terkait ruang dan waktu.

Modul Pengantar Ilmu Administrasi Negara mencakup berbagai topik yang berkaitan dengan pengertian administrasi negara, Administrasi Negara sebagai Disiplin Ilmu, Dasar-Dasar Administrasi Negara dan Kedudukan Administrasi Negara sampai dengan Kekuasaan Administratif dan Pelimpahan Wewenang.

Dalam kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dari semua pihak di FISIP Universitas Jayabaya, khususnya Program Studi Administrasi Negara yang telah banyak membantu hingga tersusunnya Modul ini.

Penulis menyadari bahwa Modul ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, kami mengharapkan saran dan kritik sebagai masukan untuk kesempurnaan Modul ini. Semoga hasil dari Modul ini dapat memberikan manfaat.

Dengan Hormat,

Eka Wahyu Hidayat

PENGANTAR ILMU ADMINISTRASI

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JAYABAYA
2019**

KONSEP ADMINISTRASI

1. Administrasi diartikan sebagai suatu proses pengorganisasian sumber-sumber sehingga tugas pekerjaan dalam organisasi tingkat apa pun dapat dilaksanakan dengan baik.
2. Sebagai suatu metode, administrasi berlangsung dalam organisasi formal, yaitu suatu unit sosial yang dibentuk untuk tujuan yang mencakup unsur-unsur konflik dan unsur-unsur perubahan.
3. Administrasi adalah proses yang keseluruhan kegiatan organisasi diarahkan pada pencapaian tujuan antara dan tujuan akhir (*Goals and objective*)

Ilmu administrasi adalah salah satu cabang ilmu sosial yang paling muda, lahir pada akhir abad ke-19. Henri Fayol (1841-1925)

TIGA FUNGSI UTAMA ADMINISTRASI

Proses administrasi akan melaksanakan tiga fungsi utama dalam hierarki formal



Terutama berkaitan dengan proses perencanaan jangka panjang dari suatu tujuan yang akan dicapai

Terutama berkaitan dengan upaya mempertahankan organisasi sebagai suatu pekerjaan yang terus berlangsung lama

Mengarahkan penggunaan sumber-sumber serta menjalin agar kegiatan-kegiatan profesional dan teknis dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan

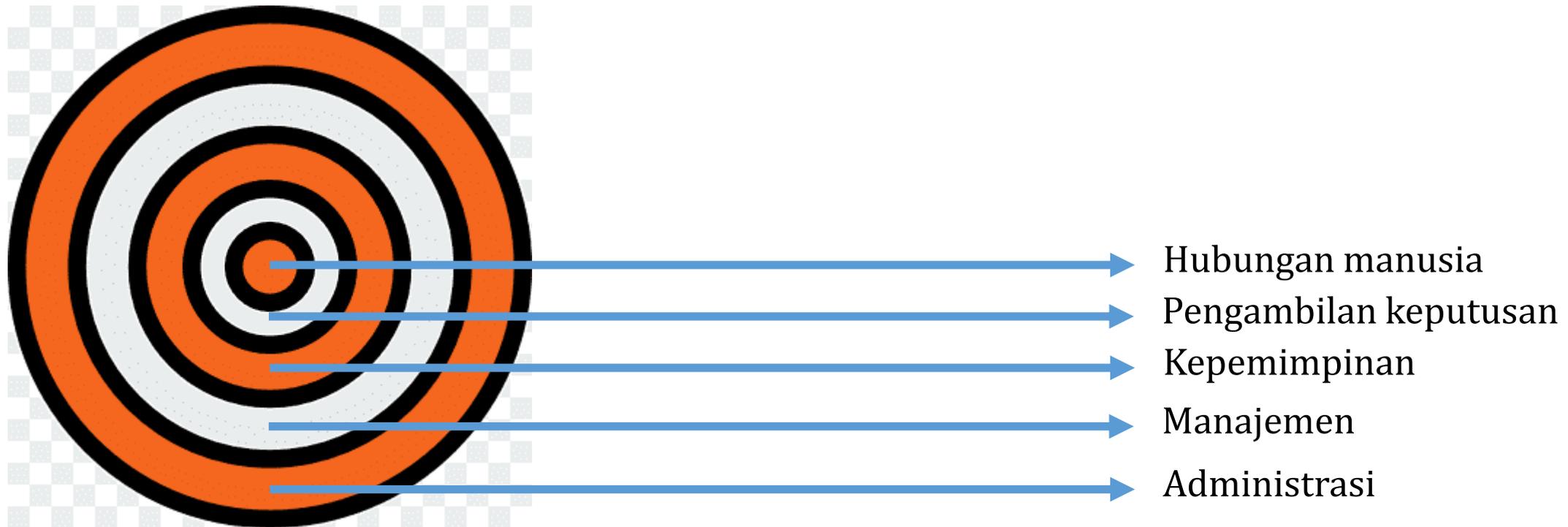
UNSUR-UNSUR ADMINISTRASI

1. Organisasi, yaitu wadah bagi segenap kegiatan usaha kerja sama.
2. Manajemen, yaitu kegiatan menggerakkan sekelompok orang dan mengarahkan fasilitas kerja, hubungan ini meliputi: Perencanaan, Pembuatan Keputusan, Pembimbingan, Pengoordinasian, Pengawasan (kontrol), serta Penyempurnaan dan perbaikan tata struktur dan tata kerja.
3. Komunikasi, yaitu penyampaian berita dan pemindahan buah pikiran dari seseorang kepada yang lainnya dalam rangka terwujudnya kerja sama.
4. Kepegawaian, yaitu pengaturan dan pengurusan pegawai atau karyawan yang diperlukan.
5. Keuangan, yaitu pengelolaan segi-segi pembiayaan dan pertanggung jawaban keuangan.
6. Perbekalan, yaitu perencanaan, pengadaan dan pengaturan pemakaian barang-barang keperluan kerja.
7. Tata Usaha, yaitu penghimpun, pencatatan, pengolahan, pengiriman, dan penyimpanan berbagai keterangan yang diperlukan.
8. Hubungan Masyarakat, yaitu perwujudan hubungan yang baik dan dukungan dari lingkungan masyarakat terhadap usaha kerja sama.

PERSAMAAN ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN

1. To control: Mengatur dan Mengurus
2. Dalam Administrasi dan Manajemen dikenal dengan istilah Administrator dan Manajer

Dimock dan Koenig (2008) berpendapat bahwa inti administrasi adalah manajemen, inti manajemen adalah kepemimpinan, inti kepemimpinan adalah pengambilan keputusan, dan inti pengambilan keputusan adalah hubungan antarmanusia.



PERBEDAAN ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN

Secara garis besar, perbedaan administrasi dan manajemen adalah:

1. Administrasi lebih cocok digunakan pada lembaga-lembaga pemerintah yang mengutamakan kepentingan sosial (*non profit oriented*). Sedangkan manajemen lebih cocok digunakan pada lembaga-lembaga swasta/perusahaan yang mengutamakan komersial (*profit oriented*).
2. Administrasi sebagai bentuk penerapan berpikir rasional untuk mengorganisasikan kegiatan-kegiatan yang menghasilkan pengetahuan administrasi yang peduli pada nilai-nilai, administrasi lebih berpihak pada manusia di dalamnya. Sedangkan manajemen mengacu pada hal-hal bersifat spesialisasi, kuantitatif, kegiatan yang mengharuskan administrator melakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan engendalian.
3. Administrasi merupakan *clerical work*, kerjanya. Sedangkan manajemen mendayagunakan sumber daya

PERBEDAAN ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN

Secara spesifik perbedaannya adalah:

Administrasi	Manajemen
Fokus: Penetapan tujuan	Fokus: Bagaimana mencapai arah yang ditetapkan
Berada pada level atas	Berada pada level menengah – bawah
Berorientasi pada tujuan	Berorientasi pada sasaran atau cara mencapai tujuan
Pola pikir sebagai seni (<i>art</i>)	Masalah teknis (<i>science</i>)

ADMINISTRASI

1. Administrasi ialah suatu proses yang umum pada setiap usaha yang dilakukan oleh negara atau swasta, sipil dan militer baik dalam ukuran besar atau kecil. Administrasi adalah proses kerja pada pemerintahan pusat maupun daerah, universitas, sekolah-sekolah, perkereta-apian, pertambangan, perhotelan dan lain sebagainya.
2. Walaupun tujuan dan bentuk administrasi itu berbeda dan juga administrasi dari Negara dan Swasta berbeda persoalannya, tetapi ada hal yang sama, yaitu prosesnya.
3. Seni administrasi ialah pembimbingan/pengarahan (*direction*), koordinasi (*coordination*), dan pengawasan (*control*) terhadap orang-orang dalam rangka mencapai tujuan. Hal itu merupakan seni yang dinamis yaitu membawa atau membimbing orang-orang kearah tercapainya tujuan yang dikehendaki
4. Administrator adalah seseorang yang secara konsekuen membimbing, mengkoordinasi dan mengawasi kegiatan-kegiatan orang lain
5. Keadaan seni administrasi berbeda-beda dan tergantung kepada berbagai faktor seperti:
 - a. Tata tertib masyarakat
 - b. Ilmu pengetahuan dan pengetahuan praktis
 - c. Kualitas komunikasi
 - d. Kegemaran dan prasangka dari pada orang-orang
 - e. Pemilikan tentang *know how*
 - f. Dan lain-lain

ADMINISTRASI NEGARA

1. Secara defenitif, Administrasi Negara ialah segala pekerjaan yang bertalian dengan pencapaian tujuan atau pelaksanaan kebijakan negara (*Public administration consist of all those operations having for their purpose the fulfilment or enforcement of public policy*).
2. Suatu sistem administrasi negara ialah compositas dari pada semua undang-undang, peraturan, praktik perhubungan-perhubungan dan adat kebiasaan yang berlaku setiap waktu dalam batas-batas hukum (*juridiksi*) untuk melaksanakan kebijakan negara (*public policy*)
3. Administrasi bukan hanya bagian untuk menstabilisasi masyarakat tetapi merupakan bagian yang tertinggi dari pada kesanggupan/pemikiran manusia dengan lapangan yang terletak pada pekerjaan yang harus dikerjakan. Administrasi Negara bertalian dengan kegiatan dalam situasi yang konkrit dan khusus, tetapi bersesuaian dengan tujuan-tujuan yang akan dicapai. *Skill* (kecakapan) di dalam administrasi ialah satu kemampuan masyarakat yang tergantung kepada kemajuan kebudayaan.

PENDEKATAN STUDI ADMINISTRASI NEGARA

1. *Constitutional-legal-historical approach* (Pendekatan berdasarkan kepada sejarah hukum konstitusi).
2. *Structural descriptive approach* (Pendekatan berdasarkan kepada penguraian struktur).
3. *Socio-psychological-approach* (Pendekatan berdasar kepada psikologi sosial).

Dari ketiga pendekatan tersebut, didapat suatu interpretasi (penafsiran) yang luas terhadap administrasi negara, dimana hal itu bertalian dengan struktur birokrasi dan tata kerjanya dan hubungan manusia dalam organisasi serta kekomplekan pembuatan keputusan

CONSTITUTIONAL LEGAL HISTORICAL APPROACH

1. *Constitutional-legal-historical approach* (Pendekatan berdasarkan kepada sejarah hukum konstitusi) didasarkan atas suatu kerangka kerja tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban pemerintah yang ditetapkan UUD (Konstitusi) atau ditentukan terlebih dahulu oleh pemikiran-pemikiran atau keputusan-keputusan berdasar pada hukum yang ada.
2. Dianggap menunjukkan gambaran yang sempit terhadap Administrasi Negara dan tidak memperhatikan peranan administrasi secara tradisional dalam pemerintahan.
3. Tekanannya diletakan pada norma-norma hukum dan politik dan bukan kepada organisasi.
4. Ditujukan untuk mempelajari peranan cabang-cabang/lembaga pemerintahan yaitu badan eksekutif, legislatif dan yudikatif serta hubungan satu sama lain dan pengaruh *policy* dan tindakan-tindakannya terhadap kebijaksanaan administrasi pemerintahan

STRUCTURAL DESCRIPTIVE APPROACH

1. *Structural descriptive approach* (Pendekatan berdasarkan kepada penguraian struktur). Belum mencakup hubungan administrasi negara dengan lingkungan dan belum mencakup keseluruhan pertimbangan bahwa administrasi merupakan hubungan manusia, padahal hubungan manusia itu merupakan hakekat dari pada administrasi, mengingat administrasi tanpa hubungan manusia akan banyak kehilangan artinya.
2. Hanya menekankan pada struktur organisasi teknik kepegawaian negeri dan administrasi keuangan.
3. Cenderung memberikan hal-hal yang berguna bagi administrasi dari pada memberikan gambaran tentang administrasi.
4. Terdapat dasar penguraian tentang hubungan atau pertalian dengan struktur birokrasi baik sebagai suatu penyusunan organisasi maupun sebagai konsepsi teori dari pada ilmu politik.

SOCIO PSYCHOLOGICAL APPROACH

1. *Socio-psychological-approach* (Pendekatan berdasar kepada psikologi sosial) merupakan suatu approach yang baru, yang merupakan suatu hal yang berarti bagi ilmu tingkah laku, mengingat approach ini bertalian dengan studi yang sistematis terhadap tingkah laku manusia dalam hubungan organisasi.
2. Cenderung menekankan kepada pentingnya suatu perasaan, sehingga memberikan gambaran yang tepat bagaimana seharusnya berbuat.
3. Berusaha secara sadar mencari ukuran umum tentang organisasi dan administrasi.
4. Mempercayai bahwa dalam proses administrasi itu ada ketertiban dan ketetapan (*consistency*) atau sekurang-kurangnya hubungan manusia itu merupakan pusat dari pada administrasi. Oleh karena itu, approach ini dapat dikatakan seluruhnya bertalian dengan proses kegiatan di dalam administrasi.

TUJUAN ADMINISTRASI NEGARA

1. Tujuan administrasi negara suatu negara tergantung kepada tujuan negara itu sendiri (falsafah negaranya).
2. Tujuan administrasi negara di dalam negara demokrasi adalah untuk mencapai tujuan negara yang telah ditetapkan oleh rakyat, yaitu untuk mempertahankan keamanan, menyelenggarakan kesejahteraan, mewujudkan kemerdekaan dan ketertiban serta menegakkan keadilan dari pada rakyat, atau dengan kata lain mewujudkan kehidupan yang baik bagi rakyat.
3. Jadi tugas administrasi negara adalah untuk memberikan service yang sebaik-baiknya terhadap kepentingan rakyat atau untuk mengabdikan kepada kehendak rakyat.
4. Di dalam negara demokrasi maka administrasi negara di dalam usahanya mencapai tujuan negara yang telah ditetapkan bersifat demokratis pula atau dengan kata lain disebut dengan *democratic administration* atau *democratic management* atau *open management*.

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI NEGARA

Agar supaya penyelenggaraan administrasi negara itu betul-betul untuk kepentingan rakyat, maka dalam administrasi negara diperlukan adanya:

1. *Social participation*, yaitu ikut sertanya rakyat dalam administrasi negara
2. *Social responsibility*, yaitu pertanggung jawaban dari administrator negara terhadap rakyat
3. *Social support*, yaitu dukungan dari pada rakyat terhadap administrasi negara
4. *Social control*, yaitu pengawasan dari rakyat terhadap kegiatan dan tindakan administrasi negara

ADMINISTRASI NEGARA SEBAGAI DISIPLIN ILMU

1. *Public management care* (kepegawaian, teori organisasi, keuangan negara, dan sebagainya)
2. *Management Specialization* (pemrosesan data, sistem informasi dan sebagainya)
3. *Policy specialization* (kebijaksanaan pemerintah di bidangbidang tertentu, seperti kebijaksanaan di bidang transportasi, perumahan, lapangan kerja dan sebagainya).

Di Indonesia, administrasi negara berfungsi sebagai alat pembangunan.

DASAR-DASAR ADMINISTRASI NEGARA

Pemerintah diberi wewenang untuk melakukan perbuatan tata usaha negara yang dapat dikelompokkan dalam tiga macam perbuatan, yaitu:

1. Mengeluarkan keputusan (*bechikking*)
2. Mengeluarkan peraturan (*fregeling*)
3. Melakukan Perbuatan Materiil (*materied daad*)

Pada saat ini, organisasi setiap negara modern terdiri dari tiga lapisan, yaitu:

1. Organisasi negara, terdiri atas lembaga-lembaga dan pranata-pranata konstitusional.
2. Organisasi pemerintahan, terdiri atas semua pejabat yang berkaitan satu sama lain dan masing-masing berwenang mendapatkan policy politik menurut tingkatan dan wilayah atau bidang masing-masing.
3. Organisasi administrasi. Negara yang melaksanakan dan menyelenggarakan policy-policy dan keputusan-keputusan pemerintah menurut hukum administrasi negara yang berlaku, dan untuk mudahnya sering juga disebut "organisasi pemerintah"

ARTI UTAMA ADMINISTRASI NEGARA

Administrasi negara mempunyai tiga arti utama, yaitu :

1. Sebagai salah satu fungsi pemerintah.
2. Sebagai aparatur (machinery) dan aparat (apparatus) dari pemerintah.
3. Sebagai proses penyelenggaraan tugas pekerjaan pemerintah yang memerlukan kerja sama secara tertentu.

Administrasi negara, terutama dipergunakan dalam arti yang kedua dan ketiga yang dapat didefinisikan sebagai keseluruhan dari struktur, unit organisasi, dan proses, yang di dalamnya terjadi keputusan-keputusan yang dinyatakan atau dianggap oleh negara sebagai mengikat semua pihak yang bersangkutan.

KEDUDUKAN ADMINISTRASI NEGARA

1. Ilmu administrasi negara deskriptif, secara analitis sistematis melukiskan keadaan administrasi negara yang ada.
2. Ilmu administrasi sebagai eskplikatif, yang dengan menyusun berbagai teori dan dalil mencoba menjelaskan mengapa sampai terjadi berbagai macam masalah dan keadaan.
3. Ilmu administrasi Negara preskriptif dan normative, yaitu melalui berbagai studi (penyedikan, penelitian, dan sebagainya) mencoba menyusun berbagai ajaran dan teori bagaimana sebaiknya menangani berbagai problema dan keinginan atau tujuan (Preskripsi berarti “resep)

Dalam ilmu administrasi, administrasi berarti pimpinan dan pengendalian organisasi secara keseluruhan (*administration is the overall governance and control of an organization*).

TINGKATAN ADMINISTRASI NEGARA

1. Sistem organisasi sentral, terdiri atas: Organisasi sentral langsung dan Organisasi dekonsentral
2. Sistem organisasi desentral, terdiri atas: Desentralisasi (otonomi) fungsional (otorita, dan sebagainya), serta Desentralisasi terotoral
3. Desentralisasi sosial (daerah I, daerah II) terdiri atas: Tugas pembantuan, Otonomi penuh
4. Sistem organisasi otonomi rural/desa

Setiap unit sistem organisasi pemerintahan tersebut terdiri atas pejabat pemerintahan dan pejabat administrasi Negara murni. Pejabat pemerintah tersebut secara bertingkat kedudukannya yaitu:

1. Pemerintah Pusat, terdiri dari Presiden dan para Menteri beserta jajarannya dan lembaga lembaga negara non departemen;
2. Pemerintah Provinsi, yaitu Gubernur beserta Kepala Badan dan Dinas dinas yang ada di jajarannya;
3. Pemerintah Kabupaten/Kota, yaitu Bupati dan Walikota beserta jajarannya;
4. Pemerintah Desa dengan aparatur desanya.

ADMINISTRATOR NEGARA

Sebagai administrator negara, untuk menjalankan fungsinya, mereka harus menguasai ilmu dan atau pengetahuan, antara lain:

1. Pengetahuan dan pengalaman teknis fungsional mengenai bidang tugas masing-masing.
2. Ilmu pimpinan yang senivo (setingkat) dengan kedudukannya (analisis lingkungan, ilmu strategi, perencanaan umum, policy dan decisions making, pengaturan, budgeting),
3. Ilmu dan pengetahuan tentang organisasi yang sesuai posisi, kemampuan mengembangkan kebudayaan organisasi yang sesuai,
4. Pengetahuan politik dan hukum yng sesuai kedudukan,
5. Ilmu policy yang sesuai dengan kedudukan,
6. Kemampuan manajemen yang sesuai dengan kedudukan,
7. Penguasaan beberapa bahasa yang diperlukan secara cukup.

ASPEK-ASPEK ADMINISTRASI NEGARA

Adapun ilmu-ilmu aspek administrasi negara Indonesia yang terpenting adalah sebagai berikut:

1. Ilmu keuangan negara (*public finance*); Ilmu keuangan negara adalah ilmu keuangan mengenai aspek-aspek finansial dari administrasi negara, dan merupakan bagian dari ilmu ekonomi politik (*political economy*) dengan menempatkan pemerintahan dan *policy* ke dalam suatu cost-benefit perspective.
2. Ilmu hukum administrasi negara; Hukum mengenai organisasi pemerintahan (administrasi negara), pembagian wewenang sebagai salah satu instrumen yuridis untuk mengembangkan dan menjalankan *policy* pemerintah, penetapan-penetapan (*beschikkingen*), dan perlindungan hukum warga dan badan masyarakat terhadap perbuatan pejabat penguasa.
3. Sosiologi pemerintahan; yang harus dibahas adalah sosiologi pemerintahan rural dan sosiologi pemerintahan urban.
4. Ilmu ekonomi pembangunan; Setiap pejabat pemerintah/administrasi negara harus mempunyai pengetahuan ekonomi yang cukup memadai dengan kedudukannya, walaupun hanya bersifat dasar.
5. Sejarah politik Indonesia; Teori dan metode analisis politikologi (ilmu politik); Dipergunakan untuk membahas perkembangan politik dan pemerintahan di Indonesia sejak tahun 1800, yakni sejak Indonesia merupakan negara kesatuan dengan wilayah sebesar sekarang

POKOK-POKOK ADMINISTRASI NEGARA

Untuk pendekatan secara teoritis, Administrasi Negara membahas masalah-masalah yang menyangkut asas-asas:

1. Dasar administrasi Negara (*principles of public administration*);
2. Organisasi dari kepegawaian negeri (*civil servant*) yang menjadi prasarana administrasi Negara;
3. Hukum administrasi negara yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem administrasi Negara yang tunduk pada hukum.

Tema pokok Administrasi Negara sesuai dengan perkembangannya yaitu:

1. Administrasi Negara menyangkut teori birokrasi, yang kemudian berkembang menjadi teori administrasi negara. Perkembangan teori birokrasi terbatas pada konsep organisasi, yang di dalamnya terdapat upaya untuk mengaitkan antara teori organisasi dan teori politik.
2. Teori administrasi negara dalam tema keduanya menyangkut persoalan efisiensi dan *economic of scale*. Hal ini mengandung pengertian bahwa dalam pelaksanaan pemberian pelayanan kepada masyarakat, administrator harus memperhatikan biaya yang harus dikeluarkannya.
3. Tema ketiga teori administrasi negara mengutamakan struktur organisasi secara formal dalam melakukan reformasi administrasi negara.
4. Tema keempat menekankan pada personal atau kekaryaan yang awalnya didasarkan pada *meritocracy* atau karyawan terbaik untuk jabatan yang tersedia melalui ujian dengan kompetisi ketat, kemudian dikembangkan pada sikap pribadinya, pertimbangan insentif, kualitas kepribadian, dan sikap kerja sama dengan rekan sekerja
5. Tema kelima dari teori administrasi Negara menyangkut masalah anggaran keuangan sebagai alat untuk merencanakan, mengambil keputusan dalam bentuk menentukan prioritas dan dalam mengalokasikan sumber-sumber ekonomi

FUNGSI ADMINISTRASI NEGARA

Fungsi administrasi ke dalam lima aspek pokok yang penting, yaitu:

1. Merencanakan
2. Mengorganisasi
3. Memimpin
4. Melaksanakan pengoordinasian
5. Melaksanakan pengawasan

Administrasi kadang-kadang menunjuk pada kata-kata khusus, baik sebagai manajemen atau organisasi, sehingga sering diterjemahkan menjadi manajemen administrative atau organisasi administrative. Dalam melaksanakan kegiatan administrasi atau manajemen, ada fungsi-fungsi administrasi yang harus dilaksanakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

PRINSIP UMUM ADMINISTRASI NEGARA

1. Efisiensi administrasi ditingkatkan melalui spesialisasi tugas dikalangan kelompok.
2. Efisiensi administrasi ditingkatkan dengan mengatur anggota-anggota kelompok dalam suatu hirarki wewenang yang pasti.
3. Efisiensi administrasi ditingkatkan dengan membatasi jarak pengawasan pada setiap sector di dalam organisasi sehingga jumlahnya menjadi kecil.
4. Efisiensi administrasi ditingkatkan dengan mengelompokkan pekerjaan untuk maksud-maksud pengawasan berdasarkan:
 - a. Tujuan
 - b. Proses
 - c. Langgan
 - d. Tempat

TEORI ADMINISTRASI NEGARA

1. Teori Deskriptif, atau deskripsi struktur bertingkat dan berbagai hubungan dengan lingkungan kerjanya;
2. Teori Normatif, atau nilai-nilai yang menjadi tujuan bidang ini, alternatif keputusan yang seharusnya diambil oleh penyelenggara administrasi negara (praktisi) dan apa yang seharusnya dikaji dan dianjurkan kepada para pelaksana kebijakan;
3. Teori Asumtif, pemahaman yang benar terhadap realitas seorang administrator;
4. Teori Instrumen, atau peningkatan teknik-teknik manajerial dalam rangka efisiensi dan elektivitas pencapaian tujuan negara

Keempat teori Bailey tersebut secara bersama-sama membentuk tiga pilar Administrasi Negara, Perilaku Organisasi, dan perilaku orang dalam organisasi kemasyarakatan, yaitu teknologi manajemen; kepentingan umum dalam hubungannya dengan pilihan etika seorang individu dan berbagai masalah kemasyarakatan

ADMINISTRASI NEGARA DAN KEBIJAKAN PUBLIK

1. Perkembangan Ilmu Administrasi Negara telah mengalami pergeseran titik tekan dari administration of public di mana negara sebagai agen tunggal implementasi fungsi negara/pemerintahan, yang menekankan fungsi negara/pemerintahan dalam public service ke administration by public yang berorientasi pada public demand are differentiated dalam arti fungsi negara/pemerintah hanyalah sebagai fasilitator, katalisator yang bertitik tekan pada putting the customers in the driver seat, tidak lagi sebagai faktor atau aktor utama atau sebagai driving forces.
2. Tumbuh kembangnya ilmu kebijakan publik sangat berkaitan dengan perkembangan ilmu administrasi negara dalam hubungannya dengan ilmu politik. Ilmu kebijakan publik muncul dan berperan menjembatani hubungan ilmu administrasi Negara dengan ilmu politik. Kata publik dalam kebijakan publik mengandung pengertian bahwa “kebijakan tersebut berasal dari publik, disusun oleh publik dan berlaku untuk publik.” Dengan demikian, kebijakan publik sangat erat berhubungan dengan kepentingan publik.
3. Kebijakan publik berhubungan dengan bidang-bidang publik yang berbeda rumusan dengan sesuatu pada bidang privat. Peran negara dan politik adalah menciptakan kondisi kepentingan privat sejalan dengan kepentingan publik.
4. Dewasa ini kepentingan publik menjadi fokus utama dalam kebijakan publik. Agar kebijakan publik tidak menyimpang dari kepentingan publik, perlu diciptakan suasana good governance dalam administrasi publik.

***GOOD GOVERNANCE* DAN KEBIJAKAN PUBLIK**

1. *Good governance* mengakomodasi 3 (tiga) pilar kepentingan yaitu antara pemerintah, privat atau swasta dan masyarakat.
2. Terdapat lima (5) sumber sistem nilai yang mempengaruhi intensitas dan dominasi dalam kebijakan publik dan kepentingan publik, yakni:
 - a. Nilai-nilai individu
 - b. Nilai-nilai profesional
 - c. Nilai-nilai organisasi
 - d. Nilai-nilai legal, dan
 - e. Nilai-nilai kepentingan publik.

Mempelajari kebijakan publik tidak akan terlepas dari pertumbuhan paradigma-paradigma ilmu administrasi negara. Pada paradigma ini ilmu administrasi negara telah menjadi administrasi negara dengan diketemukannya locus pada organisasi publik, yang berbeda tujuannya dengan organisasi bisnis. Perkembangan ilmu administrasi negara akhir-akhir ini semakin mendekatkan hubungan administratif antara organisasi publik dan privat, hubungan antara teknologi dan sosial.

GOOD GOVERNANCE

1. *Good governance* adalah tata kelola yang baik dalam suatu usaha yang dilandasi etika profesional.
2. *Good governance* sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik, yang kuat, bertanggung jawab, dan sejalan dengan prinsip demokrasi serta pasar yang efisien
3. *Good governance* berorientasi pada proses, sistem, prosedur, dan peraturan yang membuat suatu entitas bertindak dengan kerangka atau panduan
4. Konsep ini menjunjung tinggi keinginan rakyat, kemandirian, serta efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan.
5. Penerapannya membutuhkan kerja sama yang baik antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil

CIRI DAN KARAKTERISTIK *GOOD GOVERNANCE*

1. Melibatkan seluruh pihak untuk bertanggung jawab, transparan, adil, dan efektif.
2. Menegakkan supremasi hukum.
3. Memastikan prioritas sosial, politik, dan ekonomi berdasarkan konsensus komunitas.
4. Memperhitungkan kepentingan kelompok miskin dan tertinggal dalam pengambilan keputusan untuk alokasi sumber daya pembangunan.
5. Akuntabilitas: Pemerintah bertanggung jawab atas semua tindakan dan kebijakan.
6. Transparansi: Pemerintah harus transparan terhadap rakyatnya.
7. Keterbukaan: Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan tanggapan dan kritik.
8. Aturan Hukum (*rule of law*): Penegakan hukum yang adil, tegas, dan tidak pandang bulu

REINVENTING GOVERNMENT

1. *Reinventing government* adalah suatu pemikiran untuk memperbarui administrasi publik dengan menggabungkan prinsip-prinsip bisnis ke dalam birokrasi pemerintahan.
2. Gerakan ini muncul sebagai respons terhadap ketidakefisienan birokrasi tradisional

TUJUAN DAN PRINSIP *REINVENTING GOVERNMENT*

1. Menciptakan sistem atau cara-cara baru yang lebih inovatif dalam pencapaian tujuan secara maksimal.
2. Mendorong pemimpin pemerintahan untuk melakukan privatisasi terhadap fungsi-fungsi pemerintahan.
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis melalui *New Public Management*.
4. Mendorong persaingan antara penyedia layanan.
5. Memberdayakan masyarakat dengan mengalihkan kontrol dari birokrasi ke warga negara.
6. Mengukur hasil dan berorientasi pada misi yang kuat.
7. Mendefinisikan ulang klien sebagai pelanggan dan berupaya mencegah masalah secara proaktif.
8. Berusaha menghasilkan uang, bukan menghabiskannya, serta mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada operator.
9. Berinovasi dan fleksibel dalam memecahkan masalah

TUJUAN DAN PRINSIP *REINVENTING GOVERNMENT*

1. Menciptakan sistem atau cara-cara baru yang lebih inovatif dalam pencapaian tujuan secara maksimal.
2. Mendorong pemimpin pemerintahan untuk melakukan privatisasi terhadap fungsi-fungsi pemerintahan.
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis melalui *New Public Management*.
4. Mendorong persaingan antara penyedia layanan.
5. Memberdayakan masyarakat dengan mengalihkan kontrol dari birokrasi ke warga negara.
6. Mengukur hasil dan berorientasi pada misi yang kuat.
7. Mendefinisikan ulang klien sebagai pelanggan dan berupaya mencegah masalah secara proaktif.
8. Berusaha menghasilkan uang, bukan menghabiskannya, serta mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada operator.
9. Berinovasi dan fleksibel dalam memecahkan masalah

REINVENTING GOVERNMENT DAN NEW PUBLIC MANAGEMENT

1. *Reinventing government* terkait erat dengan konsep *New Public Management* (NPM), yang menekankan profesionalisme birokrasi dalam mengelola negara.
2. *New Public Management* (NPM) menuntut kualitas layanan publik yang lebih tinggi dan berorientasi pada hasil

IMPLEMENTASI DI INDONESIA

1. Strategi *Reinventing Government* diaplikasikan dalam birokrasi pemerintah melalui pendekatan integral, menggabungkan pendekatan struktural dan kultural.
2. Untuk mengonfirmasi penerapan *Reinventing Government* di Indonesia, dapat ditelusuri dari kebijakan yang diaplikasikan, contohnya kebijakan Tol Laut.
3. Penerapan *Reinventing Government* dalam pelaksanaan otonomi daerah penting untuk membangun kembali birokrasi Indonesia yang baru

TANTANGAN *REINVENTING GOVERNMENT*

1. Birokrasi Indonesia memiliki ciri patrimonial yang diwarnai dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
2. Diperlukan komitmen yang kuat dan tindakan nyata dari elit politik nasional dan lokal serta gelombang demokrasi saat ini untuk melakukan reformasi

KEKUASAAN ADMINISTRATIF & PELIMPAHAN WEWENANG

1. Kekuasaan administratif merupakan kekuasaan pemerintahan yang dijalankan melalui tindakan pemerintahan oleh badan pemerintahan.
2. Kekuasaan ini memiliki bidang cakupan yang sangat luas.
3. Pemerintah (eksekutif) menjalankan kegiatan bernegara dalam menyelenggarakan pemerintahan
4. Dalam arti luas, administrasi negara merupakan suatu pengaturan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah atau aparatur negara supaya tujuan negara bisa tercapai dengan efektif dan efisien

KEKUASAAN ADMINISTRATIF & PELIMPAHAN WEWENANG

1. Kekuasaan administratif merupakan kekuasaan pemerintahan yang dijalankan melalui tindakan pemerintahan oleh badan pemerintahan.
2. Kekuasaan ini memiliki bidang cakupan yang sangat luas.
3. Pemerintah (eksekutif) menjalankan kegiatan bernegara dalam menyelenggarakan pemerintahan
4. Dalam arti luas, administrasi negara merupakan suatu pengaturan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah atau aparatur negara supaya tujuan negara bisa tercapai dengan efektif dan efisien

PELIMPAHAN WEWENANG

1. Penggunaan wewenang pemerintahan harus memiliki dasar pemberian wewenang yang jelas atau legalitas formal.
2. Pemberian wewenang juga harus memiliki dasar legalitas material (tujuan).
3. Legalitas material (tujuan) merupakan asas khusus (*specialiteit beginsel*) yang disebut sebagai asas yuridikitas

PELIMPAHAN WEWENANG

1. Dalam administrasi negara, pemerintah (pejabat) tidak dapat menjalankan tugas-tugas dan kewajibannya tanpa adanya administrasi negara.
2. Hukum administrasi negara bertujuan untuk mengetahui bagaimana kekuasaan pemerintahan dijalankan menurut perspektif hukum administrasi, termasuk batasan-batasan dan konsekuensi hukumnya terhadap pelaksanaan kekuasaan pemerintahan

CARA MEMPEROLEH KEWENANGAN PEMERINTAHAN

1. Atribusi: Pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. Ini adalah cara normal untuk memperoleh wewenang dan membentuk wewenang tertentu serta memberikannya kepada organ tertentu.
2. Delegasi: Penyerahan wewenang dari suatu organ pemerintahan kepada organ lain. Dalam delegasi, wewenang pemberi menjadi wewenang penerima.
3. Mandat: Pelimpahan kewenangan dari badan atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah, di mana tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat. Penerima mandat melaksanakan kewenangan atas nama pemberi mandat

STRUKTUR KEKUASAAN PEMERINTAH

1. Eksekutif: Dipimpin oleh kepala negara atau pemerintahan, bertugas menjalankan dan mengimplementasikan kebijakan, serta mengelola administrasi negara.
2. Legislatif: Bertanggung jawab untuk membuat undang-undang dan kebijakan, serta mengawasi tindakan eksekutif.
3. Yudikatif: Bertanggung jawab untuk menegakkan hukum dan memastikan undang-undang diterapkan secara adil

ASAS DALAM PROSEDUR ADMINISTRASI

1. Asas negara hukum.
2. Asas demokrasi.
3. Asas instrumental.

Penggunaan wewenang pemerintahan harus memiliki dasar pemberian wewenang yang jelas (legalitas formal) dan dasar legalitas material (tujuan)

KEKUASAAN & TANGGUNG JAWAB

1. Kekuasaan dan tanggung jawab dalam sistem pemerintahan adalah dua hal yang tak terpisahkan.
2. Penguasa memiliki wewenang untuk mengatur dan memimpin, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
3. Kekuasaan tanpa tanggung jawab dapat berdampak negatif, sehingga penguasa harus melaksanakan tanggung jawab sosial dengan baik

KEKUASAAN PEMERINTAHAN

1. Kekuasaan pemerintahan dijalankan melalui tindakan pemerintahan oleh badan pemerintahan.
2. Pemerintah (eksekutif) bertugas menjalankan dan mengimplementasikan kebijakan, serta mengelola administrasi negara.
3. Kekuasaan yang ada pada pemerintah adalah untuk mengatur, memungut pajak, menegakkan hukum, mengenakan sanksi, dan seterusnya, yang merupakan serangkaian "kekuasaan" dalam upaya mencapai tujuan hidup bernegara

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH

1. Tanggung jawab pemerintah adalah kewajiban untuk memikul tanggung jawab atau menanggung akibat dari sesuatu.
2. Pemerintah memiliki tanggung jawab sosial untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ini termasuk memberikan perlindungan hukum dari berbagai tindakan pemerintah yang mungkin menimbulkan kerugian bagi masyarakat.
3. Konsep tanggung jawab pemerintah memberikan rasa kewajiban bagi pemerintah untuk bertanggung jawab atas penggunaan kekuasaan yang dapat menyebabkan kerugian bagi warga

HUBUNGAN KEKUASAAN DAN TANGGUNG JAWAB

1. Kekuasaan dan tanggung jawab tidak dapat dipisahkan.
2. Penguasa yang diberikan kekuasaan dan kewenangan untuk mengatur alam dan manusia harus bertanggung jawab atas nasib masyarakat.
3. Hukum dan kekuasaan harus seimbang (*equal*) dalam pelaksanaannya sehingga pemerintahan yang berdasarkan hukum tetap harus mengutamakan demokrasi.
4. Setiap tindakan organ pemerintah harus berdasarkan kewenangan, terkait erat dengan asas "tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban"

TERIMA KASIH